

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

III.1. Capaian Kinerja Organisasi

Format Pengukuran Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Gresik tahun 2024, diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Pengukuran Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2024 digunakan untuk mengetahui keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	Capaian Kinerja > 100%	A
2.	Capaian Kinerja = 100%	B
3.	80% < Capaian Kinerja < 100%	C
4.	50% < capaian kinerja < 80%	D
5.	Capaian kinerja < 50%	E

Adapun tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir RPJMD 2026	2024		CAPAIAN	TINGKAT KEBERHASILAN
				T	R		
1	Menghadirkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
2	Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif	Pertumbuhan Inovasi Daerah	20% (120 Inovasi)	20% (83 Inovasi)	20,29% (83 Inovasi)	101,45%	Sangat Tinggi

T : Target

R : Realisasi

Sasaran strategis Menghadirkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja Persentase keselarasan perencanaan pembangunan Daerah secara konsisten tercapai sesuai dengan target di tahun 2024 yakni 100% dan diharapkan secara konsisten dapat mencapai target 100% di tahun 2026. Sasaran strategis Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif dengan indikator Pertumbuhan Inovasi Daerah di tahun 2024 tercapai melebihi target di tahun 2024 yakni 20,29%. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja dan solusi Bappeda Kabupaten Gresik dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI
1	Menghadirkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan Daerah	100%	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sudah menggunakan Sistem Informasi SIPD yang sudah terintegrasi antara data RPJMD-RKPD sehingga memudahkan keselarasan antar dokumen.	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI
2	Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif	Pertumbuhan Inovasi Daerah	101,45%	- Adanya sosialisasi perda inovasi daerah sampai tingkat masyarakat. - Adanya penambahan muatan materi terkait tata cara penyusunan dan pemenuhan data dukung inovasi.	-

III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 melalui 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Capaian indikator tujuan dapat ditunjukkan dengan perolehan indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik dan indeks inovasi daerah. Penilaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilakukan melalui 3 struktur, yakni:

- Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai

Indeks SPBE tersebut digunakan untuk menilai tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah Kota. Dalam hal ini peran Bappeda yaitu mengkoordinasikan perencanaan SPBE di Pemerintah Daerah serta mengkoordinasikan tata kelola data dan manajemen data. Perencanaan SPBE tentu juga berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu meliputi RKPD, RPJMD Kabupaten, RKP Kabupaten, serta dokumen lain yang relevan. Indeks SPBE di Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 mencapai 4,32 dengan predikat memuaskan.

Indeks Inovasi Daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam

negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah (Permendagri 108/208). Fungsi indeks inovasi daerah pendukung reformasi birokrasi pemerintah daerah:

- a. Registrasi (Sarana Pelaporan Inovasi Daerah)
- b. Bank Data (Himpunan Inovasi Daerah)
- c. Peta Pembinaan (Instrumen Pengukuran Inovasi Daerah)
- d. Perhitungan Kinerja Pemerintah Daerah (Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Inovasi Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 sebesar 54,43 dengan interpretasi Inovatif. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis ke-1

Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah

Tabel 3.4
Pengukuran Capaian Kinerja dan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023 dengan Target Pembangunan Jangka Menengah dibandingkan dengan Capaian Provinsi/Nasional Sasaran Strategis ke-1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2026	Target 2024	Realisasi Kabupaten Gresik		CAPAIAN PROVINSI JATIM 2023	CAPAIAN NASIONAL 2023
					2023	2024		
1	Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	99,35%	98,35%

Pengukuran terhadap Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah dilihat dari Persentase Keseluruhan Program Pembangunan RPKD terhadap RPJMD dilaksanakan terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah berdasarkan penilaian terhadap keselarasan dan capaian kinerja program. Keselarasan program ditinjau dari 133 Program dalam Bab 8 RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yang dibandingkan dengan pelaksanaan program RPKD Tahun 2024. Telaah keselarasan ini menghasilkan bahwa seluruh program RPKD Tahun 2024 telah sesuai dengan Bab 8 RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Capaian Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Gresik lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Mekanisme penelaahan dilaksanakan sesuai dengan amanah Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai fasilitasi meliputi pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi (Pasal

374). Sementara amanah untuk Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem rencana pembangunan nasional, dan setiap tahun menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional (Pasal 260 ayat (1) dan Pasal 263 ayat (4). Keselarasan program ini bertujuan antara lain:

- Mensinergikan perencanaan pembangunan tahunan antar Pusat & Daerah serta antar daerah;
- Konsistensi Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD Tahun 2024;
- Keselaran penyusunan RENJA Pemerintah Daerah dengan RENSTRA Pemerintah Daerah & RKPD Tahun 2024;
- Pedoman Perubahan RKPD & Perubahan RENJA Pemerintah Daerah;
- Meningkatkan pengendalian & evaluasi hasil RKPD & RENJA Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- Tercapainya prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten/kota, provinsi dalam rangka mendukung prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024.

Sasaran Strategis ke-2

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berlandaskan inovasi melalui penguatan penelitian dan pengembangan didukung kevalidan data dan sinergitas stakeholder pembangunan.

Tabel 3.5
Pengukuran Capaian Kinerja dan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023 dengan Target Pembangunan Jangka Menengah dibandingkan dengan Capaian Provinsi/Nasional Sasaran Strategis ke-2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir RPJMD 2026	Target 2024	Realisasi Kabupaten Gresik		CAPAIAN PROVINSI JATIM 2023	CAPAIAN NASIONAL 2023
					2023	2024		
1	Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif	Pertumbuhan Inovasi Daerah	20% (120 Inovasi)	20% (83 Inovasi)	11,29% (69 Inovasi)	20,29% (83 Inovasi)	630%	99,25%

Realisasi Pertumbuhan Inovasi Daerah di Tahun 2024 sebesar 20, 29% (83 inovasi) mengalami peningkatan dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2023 di angka 11,29% (69 inovasi). Capaian Pertumbuhan Inovasi Daerah di Kabupaten Gresik lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan lebih tinggi dari Nasional.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengukur Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) sebagai refleksi tingkat produktivitas daerah. Sebagai upaya untuk mendorong kemandirian dan penguatan daya saing dalam pencapaian target pembangunan daerah di era industri 4.0 serta menjadikan Indeks Tingkat Daya Saing Daerah sebagai salah satu *entry point* dalam perumusan, penetapan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah. Hasil pemetaan ekosistem Inovasi melalui Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Gresik memperoleh nilai 3,77 yang masih berada di bawah Provinsi Jawa Timur dengan nilai 3,88 dan Nasional dengan nilai 3,43.

Tabel 3.6
Skor Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2024

Level	Lingkungan Pendukung				SDM		Pasar				Ekosistem Inovasi		Skor IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
Nasional	4,18	2,97	3,47	3,99	3,76	3,91	2,57	3,03	2,76	4,35	3,06	3,13	3,43
Provinsi Jawa Timur	4,73	4,51	3,95	4,20	3,93	4,01	2,16	2,78	2,40	5,00	4,24	4,63	3,88
Kabupaten Gresik	4,55	3,12	4,81	3,78	4,03	3,97	2,11	2,47	2,33	5,00	4,69	3,29	3,77

Sumber: BRIN, 2025

Terdapat 4 komponen penyusun IDSD 2023 yakni Lingkungan Pendukung, Sumber Daya Manusia (SDM), Pasar dan Ekosistem Inovasi. Komponen skor terendah Kabupaten Gresik ada pada komponen Pasar pada pilar ke 7 (pasar produk yang mampu mendorong efisiensi di dalam sistem produksi) dan skor tertinggi pada pilar 10 (ukuran pasar yang menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah hasil dari perkembangan iptek). Pasar produk yang mampu mendorong efisiensi di dalam sistem produksi di Kabupaten Gresik dapat dioptimalkan dengan meningkatkan promosi dan penjualan produk-produk UMKM unggulan khas Kabupaten Gresik ke pasar dalam negeri pun untuk ekspor ke manca negara sehingga dapat menambah skor IDSD di tahun berikutnya.

Pada Tahun 2024, Pertumbuhan Inovasi Daerah telah melahirkan 83 Inovasi dan telah didaftarkan ke dalam *Innovative Government Award* dan meraih penghargaan peringkat ke-128 dari 415 Kabupaten di Indonesia oleh Kementerian Menteri Dalam Negeri dengan kategori inovatif.

Tabel 3.7
83 Inovasi dalam Innovative Government Award

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Urusan Utama
1	RUBUHA	Inovasi pelayanan publik	lingkungan hidup
2	POLISI ASIK (Pelayanan Motivasi dan Konseling Khusus Pemberian ASI Eksklusif) Puskesmas Dadapkuning	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
3	CARI IDENTIFIKASI DAN TANGANI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (CINTA ABK)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
4	Gerceps TB Milenial (Gerak Cepat Pemeriksaan Suspek Tuberkulosis Menuju Eliminasi Nasional Tahun 2030 Puskesmas Kedamean	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
5	BaSah - UENak (Bank Sampah Anak - Untuk Edukasi Anak)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	lingkungan hidup
6	PRESTIGE (Presensi Terintegrasi Geotagging)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	komunikasi dan informatika
7	SILOPINTER (Sistem Informasi Pelayanan Online Pajak Terintegrasi)	Inovasi pelayanan publik	Keuangan
8	Inovasi Integrated System Pelayanan dan Informasi Cepat Melalui SIBESTIE (Sistem Informasi Berbasis Digital Terintegrasi)	Inovasi pelayanan publik	pendidikan
9	LONTAR CERi (Layanan Online Kesesuaian Tata Ruang dengan Cepat, Efektif dan Terintegrasi)	Inovasi pelayanan publik	pekerjaan umum dan penataan ruang
10	SIGAP – RTLH (Sistem Informasi Program Pendataan Rumah Tidak Layak Huni)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	perumahan rakyat dan kawasan permukiman
11	Pelitaku Tiba di Posyandu (Penandaan Balita Timbang dan Ukur Tinggi Badan di Posyandu)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
12	B_T DARING (BRIKET DAUN KERING)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	lingkungan hidup
13	BATIK SENTONO	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
14	CANTING EMAS (Cegah dan Atasi Stunting Bersama Masyarakat)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	kesehatan
15	LEBUDETIK'S (LESTARIKAN BUDAYA DENGAN MEMBATIK)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Urusan Utama
16	SABALIBU (SABUN HERBAL LIDAH BUAYA)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
17	SAKING CINTA (Saatnya Skrining IVA dengan Cara Inspeksi pada Organ Wanita)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
18	Kringat Wangi Bu Resti dalam Cetingan Selebriti (Kring Pengingat dan Waktu Pendampingan Ibu Hamil Risti untuk Mencegah Stunting dan Selamatkan Ibu Hamil Risiko Tinggi)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
19	JELITA TB (JEMPUT LAYANI PENDERITA TB)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
20	Eco Enzym	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
21	Salep D'RB 33	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
22	BADUT RAWA (Bacaan Dongeng untuk Perbaiki Karakter Siswa)	Inovasi pelayanan publik	pendidikan
23	MAS DARSA (Masyarakat Sadar Pengelolaan Sampah)	Inovasi pelayanan publik	lingkungan hidup
24	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Gresik	Inovasi pelayanan publik	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
25	AKADEMI PETIR (AKADEMI UNTUK PENDERITA TB RESISTAN)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
26	SIBESTIE (Sistem Informasi Berbasis Digital Terintegrasi) Berbasis Android	Inovasi pelayanan publik	pendidikan
27	DESA SIAP (Sistem Informasi Administrasi Pemerintahan Desa)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	komunikasi dan informatika
28	SIABDI (Sistem ABsensi DIgital)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
29	LAPAK BACA CERIA	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
30	BHe GTK (Bukti Hadir Elektronik Guru dan Tenaga Kependidikan Kab. Gresik)	Inovasi pelayanan publik	pendidikan
31	UMG (Uji Mutu Guru Kab. Gresik)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	pendidikan
32	Sistem informasi rEkomendasi PERijinan layanan Kelitbangan dengan digitAl sigNature (SEPEKAN)	Inovasi pelayanan publik	Penelitian dan Pengembangan

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Urusan Utama
33	SIB KIBAR	Inovasi pelayanan publik	sosial
34	RUMAHKUSIP (Rumah Khusus, dan Umum dalam Sistem Informasi Pendataan)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	perumahan rakyat dan kawasan permukiman
35	Bantuan Untuk Pemberdayaan Perempuan Usaha dan Pendidikan Anak (BUNDA PUSPA)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
36	SICENTING BERKISAH "ATASI DAN CEGAH STUNTING BERSAMA KITA BISAH"	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
37	GRESIKPEDIA	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
38	GERDA CANVIK IVA	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
39	GREBEK WARUNG SATE (Skrining Pemeriksaan Tekanan Darah pada Pengunjung Warung Sate di Pasar Wage Kecamatan Dukun)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
40	SEPAKET (Sistem Pengambilan Keputusan)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	pendidikan
41	JEDDER (Jemput Dahak oleh kaDER)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
42	LASKAR SEHATI (Kader PKK Pokja-4 Peduli pada Semua Ibu Hamil tentang Kartu Skor Puji Rochyati)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
43	KEBUT LAGI	Inovasi pelayanan publik	komunikasi dan informatika
44	RATU PENSIL IMUT (Gerakan Satu Jam Pencatatan Hasil Imunisasi Terpadu)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
45	PERSADIVA (PERempuan SAdar DIri akan IVA)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
46	GEMA REMATING (Gerakan Bersama Remaja Cegah Stunting)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
47	ForPeKa Gresik	Inovasi pelayanan publik	pekerjaan umum dan penataan ruang
48	AKSI PEMANTOLOGI	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
49	Gresik Newsroom	Inovasi pelayanan publik	pendidikan
50	ARISAN LIONTIN	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
51	RASAKU RINDU (masyaRAkat deSAKU maRI posbINDU)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
52	KUDAKU TENAR (Aku Datang Alat Ukur Tepat dan Benar)	Inovasi pelayanan publik	perdagangan
53	SIAP KIR	Inovasi pelayanan publik	perhubungan

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Urusan Utama
54	SIP DINDA (Safari Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik)	Inovasi pelayanan publik	penanaman modal
55	POEDAK (Pelayanan Online Pendaftaran Administrasi Kependudukan)	Inovasi pelayanan publik	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
56	GRESIKERJA	Inovasi pelayanan publik	sosial
57	S E T I A “Sekolah Tertib Administrasi Kependudukan”	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
58	TTM-an (Trotoar Tertib Masyarakat Nyaman)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
59	Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pemberdayaan masyarakat dan Desa
60	Bina Industri Ramah Lingkungan (BRILIAN)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	lingkungan hidup
61	KULTUR BAKTERI ENERGI MATAHARI (KULBAGIRI)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pangan
62	RUMAH INDADESA (Rumah Pelayanan Kecamatan untuk Kerjasama Investasi Desa dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa) di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pemberdayaan masyarakat dan Desa
63	PALING TAJIR LO (PATROLI KELILING TANGGAP BANJIR BENGAWAN SOLO)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
64	CETINGAN PAPA KEPO (CEGAH STUNTING DENGAN PEPAYA, PANDAN, KELOR, DAN PENDAMPINGAN ORANG TUA)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
65	CERAH HATI (CEGAH DARAH TINGGI PADA IBU HAMIL RISIKO TINGGI SEJAK DINI)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	kesehatan
66	GEREBEK PASAR LEGI (CARI PENDERITA HIPERTENSI BERSAMA TUKANG PARKIR DAN TUKANG KARCIS PASAR LEGI)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	kesehatan

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Urusan Utama
67	SI PERI LINCAH (EDUKASI DAN PEMERIKSAAN CALON PENGANTIN DI WILAYAH KECAMATAN BUNGAH)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
68	REHAT PKPR (REMAJA SEHAT DENGAN PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
69	PIRING KAJI (PROLANIS MENJARING KASUS DARI JAMAAH HAJI)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
70	LETS DO BUNG (LINK REGISTRASI DAFTAR ONLINE PUSKESMAS BUNGAH)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
71	SIKAT BUNG (SHARING INFORMASI KESEHATAN PUSKESMAS BUNGAH)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
72	GEREBEK PASAR PON	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
73	E-ROOTS	Inovasi pelayanan publik	pendidikan
74	Sipatu GT	Inovasi pelayanan publik	pariwisata
75	LAPAK KURMA SI MAS (LAYANAN PEREKAMAN KUNJUNGAN RUMAH DAN SISWA MADRASAH ATAU SEKOLAH)	Inovasi pelayanan publik	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
76	SISKATIM (Sistem Informasi Surat Keterangan Tidak Mampu)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	sosial
77	MIETING SAJA	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	kesehatan
78	Aplikasi Digitalisasi Pembelajaran (SI DILAN)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
79	PEMBERDAYAAN SISWA TERHADAP PELESTARIAN BUDAYA LOKAL DI UPT SMPN 27 GRESIK BERUPA KARYA MUSIK TRADISIONAL BERJUDUL "SANG JUANG"	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
80	Pelayanan penyaluran atau pencairan dana PIP di UPT SMP Negeri 18 Gresik tahun 2023 dengan tepat dan cepat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
81	JAKETKU (Kejar Paket Tuntaskan Putus Sekolah)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Urusan Utama
82	CENTING SENI (CEGAH STUNTING SEJAK DINI) UPAYA PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING DENGAN TAMAN PEMULIHAN GIZI	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
83	ANTI RAYAP “Amankan Dokumen Ke Digital Library untuk Arsip Penduduk”	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Sasaran pertama pada Bappeda adalah menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan indikator sasaran Persentase Keselarasan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD. Pada Tahun 2024 target sasaran tersebut adalah 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan target anggaran sebesar Rp. 12.369.070.900 dan terealisasi sebesar Rp. 11.562.943.545,31 mencapai 93,37 % dan tingkat efisiensinya sebesar 6,63%. Sasaran kedua pada Bappeda adalah mendorong penguatan inovasi daerah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif dengan indikator sasaran pertumbuhan inovasi daerah. Target dari sasaran kedua bappeda adalah 20% sama dengan 83 inovasi sedangkan realisasinya sebesar 20,29% atau sama dengan 83 inovasi. Target anggaran pada sasaran kedua sebesar Rp. 1.440.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.294.958.698,00 dengan tingkat capaian sebesar 89,93% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 10,07%.

Tabel 3.8
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang sudah dicapai dan Alokasi Anggaran dalam mencapai Tujuan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	TUJUAN : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi							
1.1	SASARAN : Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	12.369.070.900	11.562.943.545,31	93,37	6,63%
2	TUJUAN : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi							
2.1	SASARAN : Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif	20%	20,29%	100%	1.440.000.000	1.294.958.698	89,93	10,07%

III.3. Keuangan Organisasi

Badan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) Kabupaten Gresik melaksanakan 2 Urusan Pemerintahan Pada Urusan Penunjang meliputi Urusan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan. Pada Urusan Perencanaan dilaksanakan melalui 3 program terdiri 9 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 12.369.070.900 realisasi sebesar Rp. 11.562.943.545,31 atau 6,63% tidak terserap sebesar Rp. 806.127.355 disebabkan karena efisiensi. Pada Urusan Penelitian dan Pengembangan Melalui 1 Program, 3 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.440.000.000 realisasi sebesar Rp. 1.294.958.698 atau 10,07% atau tidak terserap sebesar Rp 145.041.302 disebabkan adanya efisiensi. Berikut capaian kinerja keuangan beserta dengan Capaian kinerja tahun 2024:

Tabel 3.9
Rekapitulasi Capaian Keuangan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik

No Rekening						Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2024				
								Target	Anggaran (Rp)	Realisasi	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa (Rp)
						URUSAN PENDUKUNG			7.696.479.000		7.318.339.729,31	378.139.270,69
5	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	7.696.479.000	100%	7.318.339.729,31	378.139.270,69
5	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	226.295.099	100%	195.439.000,00	30.856.099,00
5	01	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	226.295.099	3 Dokumen	195.439.000,00	30.856.099,00
5	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100%	5.975.097.000	100%	5.782.853.561,31	192.243.438,69
5	01	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/Bulan	5.975.097.000	47 Orang/Bulan	5.782.853.561,31	192.243.438,69
5	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Perangkat Daerah	100%	574.923.830	100%	489.572.296,00	85.351.534,00
5	01	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	64.930.000	4 Paket	22.166.000,00	42.764.000,00
5	01	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	13.476.000	5 Paket	13.448.000,00	28.000,00
5	01	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	1.800.000	3 Dokumen		1.800.000,00
5	01	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	397.413.030	20 Laporan	379.909.267,00	17.503.763,00
5	01	01	2	06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	97.304.800	2 Dokumen	74.049.029,00	23.255.771,00
5	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	712.251.379	100%	649.910.552,00	62.340.827,00

No Rekening						Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2024				
								Target	Anggaran (Rp)	Realisasi	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa (Rp)
5	01	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.400.000	1 Laporan	909.772,00	1.490.228,00
5	01	01	2	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	274.221.379	3 Laporan	243.677.500,00	30.543.879,00
5	01	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	435.630.000	4 Laporan	405.323.280,00	30.306.720,00
5	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	207.911.692	100%	200.564.320,00	7.347.372,00
5	01	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	207.911.692	18 Unit	200.564.320,00	7.347.372,00
						URUSAN PERENCANAAN			4.672.591.900		4.244.603.816,00	427.988.084,00
5	01	02				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program pembangunan RKPd terhadap RPJMD	100%	1.329.591.900	100%	1.281.689.878,00	47.902.022,00
5	01	02	2	01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Fasilitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	1.081.176.900	100%	1.085.361.641,00	-4.184.741,00
5	01	02	2	01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Dokumen	99.015.000	2 Dokumen	97.317.305,00	1.697.695,00
5	01	02	2	01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	35.600.400	1 Berita Acara	35.600.400,00	0,00
5	01	02	2	01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	91.268.600	2 Berita Acara	90.599.800,00	668.800,00
5	01	02	2	01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	300 usulan	24.452.000	300 usulan	24.452.000,00	0,00
5	01	02	2	01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPd)	4 Dokumen	830.840.900	4 Dokumen	837.392.136,00	-6.551.236,00

No Rekening						Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2024				
								Target	Anggaran (Rp)	Realisasi	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa (Rp)
5	01	02	2	02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitas Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	39.235.000	100%	37.458.930,00	1.776.070,00
5	01	02	2	02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	39.235.000	2 Dokumen	37.458.930,00	1.776.070,00
5	01	02	2	03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	97.784.500	100%	74.579.000,00	23.205.500,00
5	01	02	2	03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	97.784.500	3 Laporan	74.579.000,00	23.205.500,00
5	01	02	2	04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitas Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100%	111.395.500	100%	84.290.307,00	27.105.193,00
5	01	02	2	04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	111.395.500	1 Dokumen	84.290.307,00	27.105.193,00
5	01	03	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase dokumen renja kualitas baik	100%	3.343.000.000	100%	2.962.913.938,00	380.086.062,00
							2. Persentase Dokumen Renstra kualitas baik	100%		100%		
							3. Persentase keselarasan perencanaan pembangunan sektoral	100%		100%		
5	01	03	3	01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia	100%	700.000.000	100%	597.060.630,00	102.939.370,00

No Rekening						Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2024				
								Target	Anggaran (Rp)	Realisasi	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa (Rp)
5	01	03	3	01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	33.275.500	2 Dokumen	31.566.700,00	1.708.800,00
5	01	03	3	01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	22 Laporan	97.263.900	22 Laporan	94.413.250,00	2.850.650,00
5	01	03	3	01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	408.998.600	2 Dokumen	317.426.910,00	91.571.690,00
5	01	03	3	01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	160.462.000	6 Laporan	153.653.770,00	6.808.230,00
5	01	03	3	02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam	100%	678.000.000	100%	425.070.090,00	252.929.910,00
5	01	03	3	02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	280.218.770	3 Dokumen	212.094.660,00	68.124.110,00
5	01	03	3	02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Laporan	326.168.010	3 Laporan	162.053.900,00	164.114.110,00
5	01	03	3	02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	71.613.220	1 Dokumen	50.921.530,00	20.691.690,00

No Rekening						Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2024				
								Target	Anggaran (Rp)	Realisasi	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa (Rp)
5	01	03	3	03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	1.965.000.000	100%	1.940.783.218,00	24.216.782,00
5	01	03	3	03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	396.282.280,00	3.717.720,00
5	01	03	3	03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	130.000.000	2 Laporan	129.933.505,00	66.495,00
5	01	03	3	03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	760.000.000	3 Laporan	753.647.176,00	6.352.824,00
5	01	03	3	03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 laporan	150.000.000	3 laporan	141.813.897,00	8.186.103,00
5	01	03	3	03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	525.000.000	2 Laporan	519.106.360,00	5.893.640,00
						URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1.440.000.000		1.294.958.698,00	145.041.302,00
5	05	02	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Capaian indeks kepuasan masyarakat pelayanan kelitbangan	100%	1.440.000.000	100%	1.294.958.698,00	145.041.302,00
							Capaian indeks inovasi daerah	45,00 (inovatif)		45,00 (inovatif)		
							Persentase kajian penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	100%		100%		
5	05	02	2	02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Presentase Fasilitasi Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan	100%	206.473.900	100%	200.393.950,00	6.079.950,00
5	05	02	2	02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	206.473.900	1 Dokumen	200.393.950,00	6.079.950,00

No Rekening						Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	2024				
								Target	Anggaran (Rp)	Realisasi	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa (Rp)
5	05	02	2	03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase fasilitasi penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	100%	99.571.600	100%	94.466.500,00	5.105.100,00
5	05	02	2	03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	99.571.600	1 Dokumen	94.466.500,00	5.105.100,00
5	05	02	2	04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang didiseminasikan	100%	1.133.954.500	100%	1.000.098.248,00	133.856.252,00
5	05	02	2	04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	571.466.100	1 Laporan	546.797.400,00	24.668.700,00
5	05	02	2	04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	533.926.200	1 Laporan	427.922.546,00	106.003.654,00
5	05	02	2	04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	28.562.200	1 Laporan	25.378.302,00	3.183.898,00
JUMLAH KUMULATIF									13.809.070.900		12.857.902.243,31	951.168.656,69